

**IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 33
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 52 TENTANG
PENDAYAGUNAAN ZAKAT USAHA PRODUKTIF
(Studi pada LAZIS Baitul Maal Amanah Lembaga
Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam
di Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

AHMAD HABIB BUROHMAN

NPM : 1621030464

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 33
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 52 TENTANG
PENDAYAGUNAAN ZAKAT USAHA PRODUKTIF
(Studi pada LAZIS Baitul Maal Amanah Lembaga
Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam
di Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

AHMAD HABIB BUROHMAN

NPM : 1621030464

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masyakuroh, M.Si.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Menunaikan zakat adalah urusan individu yang merupakan kewajiban sebagai seorang yang beragama Islam dan merupakan kewajiban vertikal yang hubungan dengan Allah. Apabila seorang muslim telah melaksanakan zakat berarti telah beribadah dan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT yang akan mendapat pahala sebagaimana yang Allah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut seseorang dalam hal ini *muzakki* tidak terlepas dari urusan kepada sesama yakni para *mustahik*

Rumusan masalah dalam penelitian ini, *Pertama*, bagaimana pendayagunaan dana zakat di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI untuk usaha produktif menurut pasal 33 peraturan menteri agama no 52?, *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 33 peraturan menteri agama no. 52 tentang pendayagunaan zakat usaha produktif di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI?

Dengan demikian dalam melaksanakan zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara baik dari segi jenis harta yang dizakati, para wajib zakat (*muzakki*), maupun penerima zakat (*mustahik*). Sampai kepada pengelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan umat. Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para mustahik dalam menerima zakat.

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI dengan menggunakan pendekatan kualitatif. sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendayagunaan zakat usaha produktif yang dilakukan oleh LP3UI dengan memberikan dana atau modal usaha untuk *mustahik*. Dalam pendayagunaan zakat usaha produktif, LP3UI tidak hanya memberikan dana saja namun juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan zakat usaha produktif, agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik dan dalam mendistribusikan dana zakat produktifnya LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI tidak menyimpang dari ajaran agama Islam jadi hukumnya boleh (mubah) bahkan sangat dianjurkan dalam situasi kondisi masyarakat saat ini dan sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Agama NO. 52 tentang pendayagunaan zakat usaha produktif.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Habib Burohman

NPM : 1621030464

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 33 PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 52 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT USAHA PRODUKTIF (Studi Pada Lazis Baitul Maal Amanah Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam di Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung September 2020

Penulis



Ahmad Habib Burohman

NPM: 1621030464

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 33
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 52 TENTANG
PENDAYAGUNAAN ZAKAT USAHA PRODUKTIF (Studi
Pada Lazis Baitul Maal Amanah Lembaga Peduli
Pengembangan Potensi Umat Islam di Bandar Lampung)**

Nama : **Ahmad Habib Burohman**
Npm : **1621030464**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



Yufi Wiyos Masykuroh, S.Ag., M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II



Muslim, S.H.I., M.H.I.
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah



Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 33 PERATURAN MENTERI AGAMA No. 52 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT USAHA PRODUKTIF (Studi Pada Lazis Baitul Maal Amanah Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam di Bandar Lampung)"** disusun oleh Ahmad Habib Burohman, NPM 1621030464, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jumat, 13 November 2020

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

(.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag.

(.....)

Penguji Utama : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H.

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.

(.....)

Penguji II : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

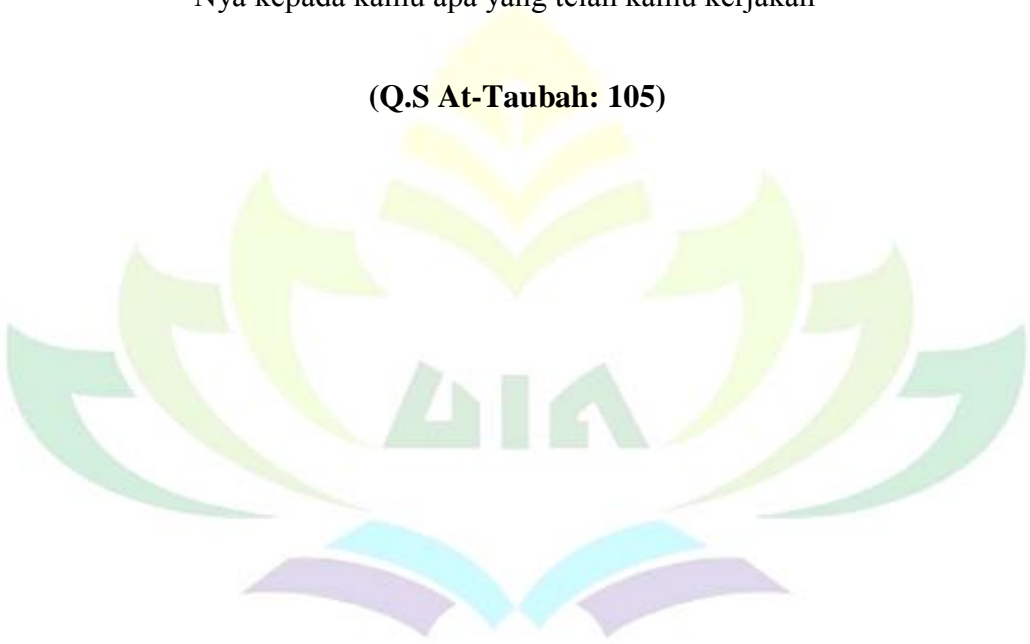
Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katankalah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’”

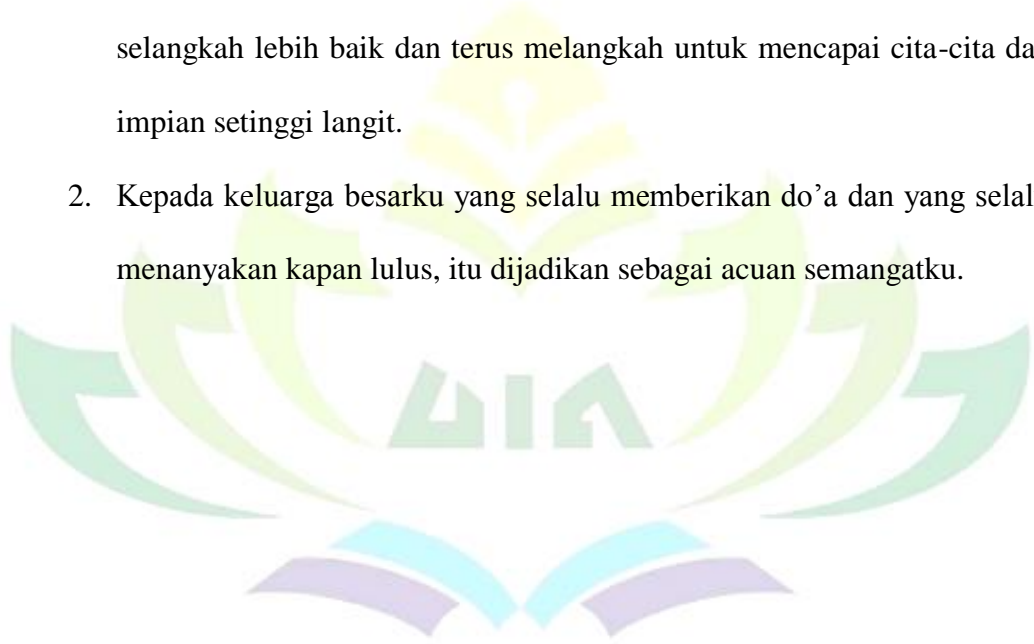
(Q.S At-Taubah: 105)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Bapak dan Mamak, Budiarto dan Haryati yang senantiasa berdo'a untuk anakmu, do'a yang tembus kelangit sehingga saat ini bisa selangkah lebih baik dan terus melangkah untuk mencapai cita-cita dan impian setinggi langit.
2. Kepada keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan yang selalu menanyakan kapan lulus, itu dijadikan sebagai acuan semangatku.



RIWAYAT HIDUP

Ahmad Habib Burohman lahir pada tanggal 12 February 1998 Bandar Lampung, anak pertama dari tiga bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan bapak Budiarto dan ibu Haryati.

Menempuh pendidikan dimulai dari:

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Sriwijaya Sukarama selesai pada tahun 2004.
2. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di MIN 5 Sukarama selesai pada tahun 2010.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 21 Bandar Lampung selesai pada tahun 2013.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016.
5. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh bangku perkuliahan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 sampai dengan 2020.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Hukum Islam Terhadap Pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52 Tentang Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif (Studi Pada Lazis Baitul Maal Amanah Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam di Bandar Lampung)”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.

Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Syariah Universitas Islam Negeri Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si. Sebagai pembimbing I yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
5. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. Sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmapung yang telah membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.
7. Teman-teman angkatan 2016, khususnya kelas K jurusan Muamalah yang telah menemaniku selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat KENCLENG selama Kuliah, Rio, Jimi, Azra, Rois, Rois, Rifqi, Anjella, Anisa Agna, Tanty, Devi, Anisa F.
9. Lina yang selalu memberikan semangat dan memberikan nasihat untuk selalu sabar dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman KKN kelompok 198 yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Mar'atus Sholikhah yang bisa diajak diskusi dalam mengerjakan skripsi dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.

12. Kepada Katon yang telah menemani saat survei lokasi pertaman kali untuk mencari tempat Studi.
13. Teman-teman kelas K, Insan, Willy, Rizki M, Ajeng, Almira, Tina, Veni, Niki, Zainal.
14. Bapak Fauzan, General Manager LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian di LAZIS.
15. Bapak Diky, Manager Pendayagunaan LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, September 2020
Penulis,

Ahmad Habib Burohman
NPM: 1621030464

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	2
C. LatarBelakangMasalah.....	3
D. FokusMasalah.....	10
E. RumusanMasalah	11
F. Tujuan danKegunaanPenelitian.....	11
G. ManfaatPenelitian.....	12
H. MetodePenelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. KajianTeori.....	16
1. Zakat	16
a. Pengertian Zakat	16
b. DasarHukum Zakat	19
c. Tujuan Zakat.....	23
d. Hikmah Zakat	27
e. Macam-macam Zakat	28
f. Mustahik	34
2. Zakat Produktif	38
a. Pengertian Zakat Produktif.....	38
b. DasarHukum Zakat Produktif.....	41

c. Pengelolaan Zakat Produktif	44
d. Macam-macam Zakat Produktif	47
3. Lembaga Amil Zakat.....	48
a. Pengertian Lembaga Zakat	48
b. Dasar Hukum lembaga pengelolaan Zakat	45
c. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat	51
d. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat.....	53
B. Tinjauan Pustaka.....	54
BAB III LAPORAN PENELITIAN	57
A. Latar Belakang LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI.....	57
1. Visi dan Misi.....	57
2. Struktur Organisasi LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI.....	58
B. Produk-Produk LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI	59
C. Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif	65
D. Upaya LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI menyeleksi Mustahiq Penerima Zakat	67
E. Sistem Distribusi	68
BAB IV ANALISIS DATA.....	70
A. Pendayagunaan Dana Zakat Usaha Produktif LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI menurut Pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52.....	70
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52 tentang Zakat Usaha Produktif Pada LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR BAGAN

1. Struktur organisasi LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI.....58



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

"Implementasi Hukum Islam Terhadap Pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52 Tentang Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif (Studi Pada Lazis Baitul Maal Amanah Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam di Bandar Lampung)" untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi adalah adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹
2. Hukum Islam adalah Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia
3. mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.²

70. ¹Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002, h.

²Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

4. Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³
5. Zakat menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.⁴
6. Produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan.⁵

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas dapat disimpulkan, maksud dari judul skripsi ini adalah penerapan terhadap Peraturan Menteri Pasal 33 No. 52 Tentang Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif berdasarkan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi "Implementasi Hukum Islam Terhadap Pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52 Tentang Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif (Studi Pada Lazis Baitul Maal Amanah Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam di Bandar Lampung) yaitu sebagai berikut :

1. Alasan objektif

- a. Zakat usaha produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Jadi disini akan

³<https://typoonline.com/kbbi/pendayagunaan/> (20 Desember 2019)

⁴ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medika), 2011, h. 22.

⁵<https://jagokata.com/arti-kata/produktif/> (11 Januari 2020)

mengetahui syarat syarat *mustahik* agar diberikan zakat usaha produktif sesuai pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52 tentang pendayagunaan zakat usaha produktif.

b. Pandangan hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat usaha produktif.

2. **Alasan Subyektif**, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup didunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu yang merupakan kewajiban sebagai seorang yang beragama Islam dan merupakan kewajiban vertikal yang hubungan dengan Allah. Apabila seorang muslim telah melaksanakan zakat berarti telah beribadah dan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT yang akan mendapat pahala sebagaimana yang Allah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut seseorang dalam hal ini *muzakki* tidak terlepas dari urusan kepada sesama yakni para *mustahik*.

Dengan demikian dalam melaksanakan zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara baik dari segi jenis harta yang dizakati, para

wajib zakat (*muzakki*), maupun penerima zakat (*mustahik*). Sampai kepada pengelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan umat. Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para mustahiq dalam menerima zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga. Hukum zakat tentunya wajib bagi semua umat muslim. Zakat secara bahasa, artinya tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan, sedangkan menurut terminologi syari'ah, berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu, yang dijelaskan didalam surat At-Taubah ayat 60 :

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah 9: Ayat 60).⁶

Maka dari itu zakat sangatlah penting bagi para *mustahik*. Agar zakat ditangan *mustahik* tidak hanya dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka zakat bisa dipakai sebagai kebutuhan produktif, atau biasa disebut zakat produktif. Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola

⁶ M. Said, *Terjemaah Al-Quran Al Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, cet. Pertama, 1987), h. 178.

pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan *mustahik*. Jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha *mustahik*. Bahwa pengembalian modal usaha oleh *mustahik* lebih pada upaya pembelajaran sebagai *strategi* agar *mustahik* bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut. Pengertian produktif adalah kata uang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disyariatkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Rujukan Hukum Zakat Produktif ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 277, yaitu :

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

"Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 277).⁷

Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang

⁷Ibid, *Terjemaah Al-Quran Al Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, cet. Pertama, 1987), h. 43.

bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka memiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Abdurrachman Qadir⁸ dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat adalah salah rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh semua muslim. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat

⁸Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) ed. 1, cet. 2, hal. 24.

adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para *mustahik* memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT).

Zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak adanya ketimpangan sosial. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan umat. bukan hanya untuk umat Islam apabila semua orang mau menunaikan zakat maka umat manusia akan makmur. Permasalahan sosial kemiskinan yang ada pada saat ini salah satunya adalah karena tidak berjalannya ibadah sosial zakat tersebut ditengah masyarakat khususnya umat Islam.

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negarapada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan

konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu. selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha. Di Indonesia sekarang ini memakai UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat.

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.⁹ Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam. Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.¹⁰

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan

⁹ Masdar F. Mas'udi. Dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), h. 1.

¹⁰ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006), h. 121.

memberikan zakat usaha produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Seseorang muslim yang baik dalam hubungan muamalahnya juga tetap mengacu pada ketentuan syariah agamanya. Melalui interaksi hubungan antara manusia tersebut, seorang hamba berharap mendapat pahala dari amal ibadah sosial yang telah dilakukannya. Ibadah zakat merupakan ibadah yang memiliki konsekuensi kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim.

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Berdasarkan hal di atas sehingga perlu kiranya diteliti pada LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI, dimana LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para *mustahik*. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh

pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat usahat produktif yang dikelola LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para *mustahik*. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Implementasi Hukum Islam Terhadap Pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52 Tentang Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif (Studi Pada Lazis Baitul Maal Amanah Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam di Bandar Lampung).**

D. Fokus Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang lebih terarah penulis mengfokuskan pembahsan mengenai implementasi Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri pasal 33 No. 52 tentang Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI.

Permasalahan-permasalahan yang di sebutkan di atas dibatasi pada periodisasi pertanggung jawaban tahun 2019, maka permasalahan yang terjadi sebelum dan sesudah tahun tersebut tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI untuk usaha produktif menurut pasal 33 peraturan menteri agama No 52?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pasal 33 peraturan menteri agama no. 52 tentang pendayagunaan zakat usaha produktif di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat usaha produktif oleh LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat produktif di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan pelaksanaan zakat usaha produktif oleh LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis ataupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi yang membaca. Sementara itu, secara praktis:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi para peneliti yang akan meneliti tentang pendayagunaan zakat usaha produktif.
2. Dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang bersinggungan langsung dengan ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹¹

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah observasi, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan

¹¹Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1997), h.

kebanyakan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan *responden*. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

1. Jenis penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan *realistis* tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap pelaksanaan zakat produktif. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*libraryresearch*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

2. Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh kemudian, akan dianalisa deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang pelaksanaan zakat produktif dalam perspektif Hukum Islam.

3. Data dan Sumber data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Yang melatarbelakangi fokus penelitian yaitu lebih mengarah pada persoalan perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan zakat produktif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data primer (Primary Data)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari *responden* atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan 2 orang pengurus LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI dan 3 orang *mustahik* penerima manfaat dana zakat

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai *relevansi* dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati pelaksanaan /pendayagunaan zakat usahaproduktif terhadap para

mustahik yang sudah diberikan zakat usaha produktif oleh LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI.

b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam hal ini peneliti mewawancarai ketua LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melaksanakan praktik zakat produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan kembali data yang telah diperoleh, karena data tersebut sangat memungkinkan adanya kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah mengurutkan data yang ada secara sistematis berdasarkan urutan masalah penelitian.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah mengelompokkan dan mengklasifikasikan data-data yang ada kedalam bentuk tertentu untuk memudahkan melakukan penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa.

Sedangkan secara etimologi berarti pertumbuhan, pertambahan, penyucian dan penghargaan (pujian). Sedangkan secara terminologi ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu, sesuai ketentuan syariat kepada orang-orang tertentu (*ashnaf makshushah*), dengan cara yang telah ditentukan.¹²

Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa dinamakan pengeluaran ini dengan zakat, adalah karena terdapat padanya makna yang dimaksudkan oleh bahasa (kesuburan).¹³

Zakat menurut Yusuf Qardhawi, berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti, tumbuh dan berkembang dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu lebih baik. Qardhawi mengatakan bahwa definisi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan

¹²Khalid bib Ali al-Musyaqiqh, *Zakat Kontemporer* (Jakarta: Embun Litera, 2010), h. 2.

¹³Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiq, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 24

kepada orang-orang yang berhak menerimnya. Demikian, Abu A'la al-Maududi dalam al-Mawardi mengemukakan bahwa “zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim didalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (nisab) dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun.”¹⁴

Ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Turmudzi dan Abu Hurairah yang artinya: “Allah menerima zakat dengan tangan kanan-Nya dan kemudian menjadikannya harta itu tumbuh bagi setiap kamu, sebagaimana halnya kamu membesarkan anak kuda atau anak unta. Bagian-bagian harta itu kemudian menjadi sebesar gunung uhud”, (Hadist Ahmad dan at-Turmudzi diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, karena itu upaya pengingkaran secara mutlak terhadap keberadaan zakat dianggap kafir, sebagai konsekuensinya orang tidak mau menunaikan, boleh diperangi dan diambil zakat dari hartanya secara paksa. Kalau kita melihat kembali kepada masa menjadi pemimpin dan sebagian orang menjadi kafir, lalu Umar berkata:

“Mengapa anda memerangi orang? Padahal Rasulullah telah bersabda, ‘aku diperintah untuk memerangi manusia kecuali mereka mengucapkan ‘tiada tuhan selain Allah’. Maka siapapun yang mengucapkan, berarti darah jiwa dan hartanya dijaga kecuali menurut haknya dan perhitungannya adalah atas Allah’. Lalu Abu Bakar menjawab, ‘demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat karena zakat adalah harta.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Untera Antarnusa, 1993) h. 34.

Demi Allah jika mereka enggan membayar infaq yang mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya kaena keengganan tersebut’, lalu Umar berkata, ‘demi hal itu berarti Allah telah melapangkan hati Abu Bakar, lalu aku tahu bahwa itulah yang bena’¹⁵.

Zakat mempunyai beberapa istilah diantaranya adalah zakat, shadaqah (sedekah), haq, nafaqah, dan afuw. Dipergunakan kata-kata tersebut dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq (At- Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (At-Taubah 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (Taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Ringkasannya zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah untuk sedekah sunnah.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat, karena zakat mensucikan diri dari kotoran, kikir dan dosa, dan dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh bagi siapapun yang mengeluarkannya. Karena zakat mununjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Membangun Peradaban*, h. 29-30.

kebeneran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlidungan bagi masyarakat bagi bencana masyarakat, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.

b. Dasar Hukum Zakat

Ajaran hukum Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al- Quran disebutkan kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al- Quran sebagai berikut:

Q.S Saba ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya:

“Katakanlah: ‘sesungguhnya Tuhanku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaknya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaknya)’. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan dan dia lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (Q.S Saba: 39).¹⁶

Q.S Saba tersebut Allah akan memberikan ganti kepada seseorang yang menafkahkan hartanya dan Allah akan melampangkan rezeki mereka. Oleh sebab itu, ayat ini memerintahkan untuk memberikan sebagian rezeki kepada orang lain, karena rezeki yang kita berikan akan diganti oleh Allah SWT.

QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43).¹⁷

¹⁶Ibid, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung, cet. Pertama, 1987), h. 390.

¹⁷Ibid, h. 8.

Q.S Al- Baqarah di atas Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat. Pada ayat ini kata shalat disandingkan dengan kata zakat, hal ini merupakan kewajiban membayar zakat sebanding dengan menunaikan shalat.

Q.S Al- Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 110).¹⁸

Q.S Al- Baqarah diatas, Allah memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dalam tafsir Al Hambra mengatakan bahwa zakat adalah pertumbuhan yang merupakan hasil dari berkah Allah SWT baik dunia maupun akhirat.

Q.S Al- An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

¹⁸ Ibid, Tarjamah, Al-Quran Al-Karim, (Bandung, cet. Pertama, 1987) h. 16

Artinya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S Al- An'am: 141).¹⁹

Dalam hadist juga diterangkan pentingnya zakat:

بُنيَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya:

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”
(HR Bukhari Muslim).

Hadist ini menjelaskan bahwa kewajiban membayar zakat merupakan salah satu pilar pondasi agama Islam. Sedangkan, dalam peraturan perundang-undangan zakat yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk usaha produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat.

¹⁹ *Ibid*, h. 132.

c. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syariatkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama muslim dan manusia pada umumnya.²⁰

Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat juga bukti rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa. Sebagai penghubung golongan kaya dengan golongan miskin. Zakat dapat mewujudkan tataan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis. Disamping itu, Islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin, dan membina persaudaraan.

- 2) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.²¹

²⁰ Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadat Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial” Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 2, No. 2 Desember 2015, hal. 388.

²¹ *Ibid*, hal, 389.

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan ini masyarakat dapat terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan yang mampu bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang yang fakir atau lemah. Allah SWT akan memberikan kelonggaran dari kesempitan, dan akan memberikan kemudahan baik didunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan dan melapangkan kesempitan didunia terhadap sesama muslim.

3) Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.²²

Perbedaan kelas yang sangat timpang pada masyarakat sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya dengan yang miskin. Suasana kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial. Golongan yang kaya menindas atau memeras yang miskin dan golongan orang miskin memendam rasa dendam dan benci terhadap yang kaya. Akhirnya dapat

²² *Ibid*, hal, 391.

mengganggu ketertiban masyarakat. Hal demikian, akan merugikan golongan yang kaya sebab terganggunya ketertiban sosial berbentuk kerusuhan, maka orang-orang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin.

Zakat juga memiliki kelebihan dapat membersihkan dan memadamkan api permusuhan yang bermula dari sifat iri dan dengki, yang disebabkan karena tidak adanya kepedulian hartawan terhadap kaum yang lemah. sebenarnya harta zakat adalah hak mereka, yang sasarannya tidak hanya membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar mereka setelah kebutuhannya tercapai dapat beribadah dengan baik kepada Allah, dan terhindar dari bahaya kekufuran.

- 4) Bentuk bergotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.²³

Zakat akan menanamkan sifat-sifat mulia yaitu kebersamaan, gotong royong dan tolong menolong. Kita dianjurkan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan dilarang untuk tolong-menolong dalam hal maksiat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah: 2,

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al- Maidah: 2).

²³ *Ibid*, hal 392.

Sebagai makhluk sosial, manusia takkan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Allah menciptakan hambanya yang berbeda-beda dalam strata kehidupan itu bukan tidak mempunyai tujuan. Ada golongan yang diberi kelebihan harta dan ada pula orang yang kekurangan harta. Semua itu bisa menjadi *sunnatullah* (hukum Allah), dimana antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan menutupi kekurangannya.

Zakat orang yang kaya dan miskin saling membutuhkan. Orang yang miskin itu sebagai objek beribadah kepada Allah dan menjadi ladang pahala bagi orang kaya yang berdema kepada mereka. Sedangkan, orang yang miskin akan terbantu melalui uluran tangan orang kaya yang berdema kepada mereka. Para hartawan mendapatkan hartanya rakyat umum dengan jalan kebijaksanaan dan usaha yang dibantu oleh rakyat umu itu. Ringkasnya, para hartawan itu menjadi kaya dengan karena rakyat dan dari rakyat. Lantaran itu, apabila sebagian rakyat tidak sanggup berusaha karena sesuatu bencana, wajiblah atas yang mampu memberikan bantuan untuk memelihara badan masyarakat yang kemaslahatan ikat mengikat dan buat mensyukuri atas nikmat yang Allah SWT. Tidak dapat diragukan bahwa orang yang kaya itu sangat membutuhkan orang fakir, sebagaimana orang fakir sangat membutuhkan orang kaya.

Disinilah peran zakat untuk membangun sikap tolong-menolong dalam kebaikan di lingkungan masyarakat. Karena mereka makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat membantu dari segi materi maupun yang berupa ibadah.

d. Hikmah Zakat

Hikmah zakat sangat banyak, dan tujuan-tujuan syariat padanya pun sangat besar, di antaranya:

- 1) Merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sejumlah harta.
- 2) Memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 43, 83 dan 110, serta hadits dari Ibnu Umar.
- 3) Perwujudan syukur kepada Allah SWT atas nikmat harta yang dianugerahkan kepada kita, dengan mengeluarkan sebagian harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 4) Membersihkan orang yang mengeluarkan zakat (*muzzaki*) dari sifat kikir dan rakus, ketergantungan kepada dunia, menghiasinya dengan akhlak terpuji, serta kebiasaan-kebiasaan baik dan mulia.
- 5) Zakat membersihkan kaum fakir miskin dari sifat iri dan dengki, serta apa yang diciptakan oleh setan di hati seorang fakir terhadap ketentuan Allah. Terkadang dia tidak menyukai ketentuan Allah tersebut, dan iri terhadap saudaranya yang kaya.

- 6) Membersihkan harta *muzzaki* dan menjaga keutuhannya, Nabi SAW menganalogikan zakat sebagai serpihan-serpihan kotor manusia. Hal itu menunjukkan bahwa harta akan bersih dengan mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta tersebut.
- 7) Merupakan wujud kepedulian si kaya untuk melipur si miskin.
- 8) Membersihkan masyarakat sosial secara umum.
- 9) Berpotensi meningkatkan harkat dan martabat, mengikis keburukan, dan menumbuh-kembangkan kebaikan.
- 10) Berpotensi sebagai jejaring (bangunan kebersamaan/solidaritas) sosial.²⁴

e. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah:²⁵

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri setiap muslimin baik tua, muda ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan dari makanan pokok daerah tersebut.

²⁴ *Ibid, Zakat Kontemporer* (Jakarta: Embun Litera, 2010, h.4.

²⁵ Elsi Kartika, *Pedoman Pengeloaan Zakat* (Semarang: UNNES Press, 2006). H. 21.

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat mengembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat futrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu yang tertentu dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perikanan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan, dan jasa serta rikaz.

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat maal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu zakat terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dari hasil tambang. Sedangkan zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis asuransi dll. Berikut adalah macam-macam zakat maal:

a) Zakat hewan ternak

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:

- i. Mencapai nisab, syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, 40 ekor untuk kambing atau domba.
- ii. Telah melewati waktu satu tahun (haul).
- iii. Digembalakan di tempat umum.
- iv. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

b) Zakat emas dan perak

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

- i. Mencapai nisab, zakatnya 2,5%.

Nisab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat, sedangkan nisab perak adalah 595 gram.

- ii. Telah mencapai haul.

c) Zakat perdagangan

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

- i. Niat berdagang.
- ii. Mencapai nisab.
- iii. Nisab dari zakat perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
- iv. Telah mencapai 1 tahun.

d) Zakat hasil pertanian

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:

- i. Pengeluaran zakat setiap panen.
- ii. Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigrasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

e) Zakat investasi

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:

- i. Senilai 85 gram emas.
- ii. Telah genap setahun.
- iii. Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

3) Zakat Harta Persekutuan

Yang dimaksud dengan harta persekutuan (*khalithain*) dalam bab zakat, ialah dua harta yang dikeluarkan zakatnya yakni milik dua orang, yang digabung jadi satu dengan tujuan kerjasama atau lainnya. Maksudnya ialah, persekutuan antara dua orang yang berwajib zakat, masing-masing memiliki senisab zakat atau lebih, yang dimilikinya setahun penuh berasal dari membeli atau waris atau lainnya, sedang harta itu sejenis.

Perlu diperhatikan, bahwa kedua harta gabungan jenis ini bercampur secara merata. Maksudnya, milik masing-masing tidak

bisa dibedakan satu sama lain, tetapi masing-masing mempunyai bagian tidak tertentu dari harta milik bersama itu menurut presentasinya masing-masing. Contohnya, bila ada dua orang beraudara mewarisi dari ayah mereka 40 ekor kambing, atau keduanya membeli bersama-sama kambing sebanyak itu. Dalam hal ini masing-masing dari mereka berdua memiliki setengah dari tiap-tiap ekor. Begitu, pula kalau yang diwarisi atau dibeli itu berupa barang atau tanah. Maka masing-masing memiliki bagian setengah dari tiap-tiap bagian tanah atau barang itu, tanpa bisa ditentukan.²⁶

4) Zakat Rikaz

Zakat barang temuan (*rikaz*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam didalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena wajib zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditentukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

5) Zakat Piutang

²⁶ Hasbi ash-Shiddiq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 15

Zakat piutang adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah meminjamkan suatu harta yang berupa barang maupun uang dengan jumlah tertentu kepada orang lain, dan harta tersebut telah mencapai syarat-syarat kewajiban zakat. Para ulama berselisih pendapat tentang zakat piutang apakah wajib dikeluarkan oleh si pemilik piutang dengan pertimbangan bahwa dialah pemilik hakiki dari uang tersebut, ataukah wajib dikeluarkan bagi orang yang berutang dengan pertimbangan, dikarenakan dialah yang menggunakan uang itu dan yang memanfaatkannya, ataukah ditiadakan dari keduanya karena kepemilikan keduanya tidak sempurna.

Pendapat paling adil tentang zakat utang ini yaitu hutang yang dapat diharapkan pelunasannya, yaitu utang yang ada pada orang yang berkelapangan dan sanggup membayarnya. Utang seperti ini harus dikeluarkan zakatnya bersama harta yang dimilikinya setiap kali masuk satu tahunnya atau haul.

f. Mustahik

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan hasil zakat secara baik. Tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat pada tataran

aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, *mustahik* zakat ada 8 golongan adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Menurut Imam Syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai harta pencarian yang mana hal ini, dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta atau tidak.

- a) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya seperti: pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lain-lain. tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan, mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁷
- b) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak dan lain-lain.

2) Miskin

Adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

²⁷ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Acceleration Kesenjangan Kesejahteraan", Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 12, Nomor 2, April 2015), h. 30

3) Amil

Amil adalah para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya, dalam membantu kelancaran zakat karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Semua orang yang terlibat dalam tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang telah disepakati.

4) Muallaf

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasul-Nya. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para *muallaf* tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategi dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini.

5) Riqab/ memerdekakan budak

Di zaman dahulu, banyak dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang

yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Dengan hal tersebut, dana zakat untuk kategori *riqab* dapat digunakan untuk memerdekakan orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.²⁸

6) *Gharim* (orang yang memiliki hutang)

Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan:

- a) Orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, harta terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- b) Orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa, orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberikan sebagian zakat walaupun ia kaya jika kekayaan itu dimiliki benda tidak bergerak bukan memiliki hutang.

²⁸ Arif Wibowo, *Op.Cit*, h. 31

7) *Fi Sabilillah*

Yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi. Dalam pengertian ini, dana zakat untuk *fi sabilillah* dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintah yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah, membangun sarana dan prasarana umum, serta usaha-usaha lainnya yang secara konsisten ditunjukkan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.²⁹

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil disebut juga sebagai *musaffir* atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Namun, dana zakat tidak hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.

²⁹ Ari Wibowo, *Op. Cit*, h. 32.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik.

Pendayagunaan khususnya yang berupa infak dan shadaqah diperuntukan sebagai usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan.

Pengertian zakat secara produktif yang lainnya yaitu zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu ada sebagian yang diarahkan pendayagunaannya kepada setiap orang yang produktif. Yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan, dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan hasil yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan segala bertahap,

pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk kelompok *mustahik* zakat, melainkan menjadi *muzakki*.³⁰

Penelitian ini pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila diikuti dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan konsumtif.³¹

Peraturan Menteri Agama No. 52 tentang Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif. Pihak lembaga harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Peraturan Menteri Agama No. 52 tersebut, berikut isi pasal tersebut:

- 1) Apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
- 2) Memenuhi ketentuan syariah
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*
- 4) *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa sampai saat ini masyarakat muslim masih dalam sekatan ekonomi terbelakang. Ini berarti masalah pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk

³⁰ Munain Rafi, *Potensi Zakat dari Konsumtif Kreatif Konsumtif Produktif Berdayagunaan Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011)h. 32.

³¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 63.

mayoritas muslim. Oleh karena itu untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut timbullah pemikiran inovatif dari para ahli ekonomi Islam untuk mengembangkan sistem baru dalam pendistribusian zakat, dan salah satunya adalah pola pendistribusian dengan cara produktif.³²

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif berarti adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.³³

Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam 2 bentuk, yaitu:

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang seperti, kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menerima zakat.

³² M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 124.

³³ Ibid, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 6.

- 2) Distribusi bersifat produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil maupun rumahan.

Dari waktu ke waktu, sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum pernah mendapatkan santunan zakat maupun infaq. Zakat produktif menurut penulis yaitu zakat yang dapat dilaksanakan asalkan pengelolaan yang sudah siap dan masyarakat yang menerima juga sudah dalam keadaan siap untuk mengelola, dan alangkah baiknya lembaga pengelolaan zakat membimbing masyarakat dalam menggunakan zakat tersebut.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Al-Quran tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi *istinbath* hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah.

Sebagaimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pemberdayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum distribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahik*. Dana zakat diberikan atau dipinjamkan untuk menjadi modal usaha bagi orang fakir, miskin, maupun orang-orang yang lemah.

Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah diperintahkan oleh Allah SWT, artinya kaum muslimin diwajibkan untuk berzakat dan zakat juga dijelaskan ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apa bila dilihat dari manfaatnya, zakat memiliki banyak manfaat dan Allah SWT memberikan landasan dasar hukum tentang zakat.

Al-Quran banyak yang telah ditegaskan bahwa orang-orang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin dan kemelaratan. Dalam beberapa ayat Al-Quran ditentukan, agar nasib fakir dan miskin diperhatikan benar, karena itu adalah diantara misi agama Allah itu diturunkan didunia.³⁴

Firman Allah SWT:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلِي الْأَرْحَامِ الْفَقِيرَ

Artinya:

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dari padanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan kafir.” (QS. Al-Hajj: 28).³⁵

Al-Baqarah: 271

³⁴ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) h. 19.

³⁵ M. Said, *Tarjamah Al- Quran Al Karim*, (Bandung: Al- Ma'arif, cet. Pertama, 1987), h. 302

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapusnya dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 271).³⁶

Al- Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat oleh (jihad) dijalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan memelihara sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja hata yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.” (Al- Baqarah: 273).³⁷

Dari ketiga ayat di atas dapat dipahami, bahwa orang fakir yang sengsara harus diperhatikan. Kefakiran itu perlu dikurangi dan dihilangkan, karena bisa merusak (iman), sebagaimana sabda Nabi:

Artinya: “Kekafiran itu dekan dengan kekufuran”.

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu:

³⁶ Ibid, h 42

³⁷ Ibid, h 43

- 1) Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. (Zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).
- 2) Bahwa kemaslahatan tersebut kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. (Zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat Islam yang membutuhkan).
- 3) Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma*.³⁸

c. Pengelolaan zakat produktif

Pengelolaan zakat produktif merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Pengelolaan zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.³⁹

Dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus

³⁸Muhammadiyah Zuhridan A, Dorib, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1999).
h. 120.

³⁹ Murysidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2003), h. 169

didistribusikan kepada para *mustahik* sebagaimana tergambar dalam surat at-taubah ayat 60.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

- 1) Pendekatan secara *parsial*, dalam hal ini ditunjukkan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat *insidentil*. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- 2) Pendekatan secara *struktual*, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambngan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzakki*.⁴⁰

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijakan dari lembaga/badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja. Tetapi dapat diberikan dalam kebutuhan yang lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para *mustahik* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk

⁴⁰ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 51

hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal lain diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.⁴¹

d. Macam-macam Zakat Produktif

Zakat produktif ada dua dalam penyaluran zakat produktif yaitu tradisional dan kreatif. Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya, “Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf” pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan dalam beberapa kategori:

- 1) Ekonomi Tradisional, yaitu artinya zakat diberikan kepada yang berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberi fakir miskin untuk

⁴¹ A. Qodir Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 149

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibedakan kepada korban bencana alam.

- 2) Ekonomi Kreatif, artinya zakat yang diberikan atau diwujudkan dalam bentuk lain misalkan alat-alat sekolah, makanan, beasiswa, alat mengaji dan lain-lain.
- 3) Produktif Tradisional, artinya zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, ayam, alat tukang, mesin jahit, dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Zakat yang diberikan ini dapat bermanfaat serta mendorong masyarakat bersemangat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- 4) Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diberikan semua dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang usaha kecil.

Pengertian zakat di atas inilah yang perlu kita kembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati kebenaran, zakat baik yang terkandung dalam fungsi ibadah maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat pada umumnya, kesadaran membayar zakat baru tampak pada sebuah zakat fitrah sedangkan untuk zakat harta dan zakat lain-lainnya belum tampak.

Pada beberapa tahun akhir ini, pengelolaan zakat mulai memperlihatkan kemajuannya, bila sebelumnya *muzakki* atau

pemuka agamanya, telah membayar zakatnya kepada panitia Amil Zakat, baik di mushalla, masjid-masjid, dan kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Setelah dana terkumpul dibagikan kepada *mustahik* untuk kegiatan produktif.

Upaya dalam meningkatkan pendayagunaan zakat baik dalam bentuk produktif ataupun investasi tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila dana zakat yang terkumpul jumlahnya sedikit, dan belum melangkah kearah tersebut, diupayakan kesadaran membayar zakat atau potensi zakat yang ada di masyarakat pada saat ini.

3. Lembaga Amil Zakat

a. Pengertian Lembaga Pengelolaan Zakat

Istilah lembaga menurut *ensiklopedia* sosiologi diistilahkan dengan “*institusi*”, sebagaimana didefinisikan oleh Adelman dan Thomas, bahwa lembaga atau institusi sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. *Pertama*, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. *Kedua*, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (*the rules of the game*). *Ketiga*, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi diatas menunjuk pada hirarki mulai dari yang lebih ideal hingga yang paling konkrit, dimana

institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya.

Sementara Sulaiman Taneko mendefinisikan institusi dengan adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam institusi tersebut. Institusi merupakan pola-pola yang telah mempunyai kekuatan tetap dan aktivitas unruk memenuhi kebutuhan hauslah dijalankan atas atau pola-pola itu.⁴² Jadi dapat dikatakan bahwa lembaga atau institusi adalah suatu wadah yang didirikan untuk menampung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelembagaan memiliki beberapa tipe. *Pertama*, kelembagaan yang bukan organisasi. *Kedua*, kelembagaan yang juga merupakan organisasi. *Ketiga*, organisasi yang bukan kelembagaan.

Sedangkan pengelola atau amil zakat sendiri adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang, badan perkumpulan atau oerorganisasi pengelola zakat untuk mengelola zakat secara profesional, baik dari perkumpulan, penerimaan, pendistribusian dan pemberdayaan.⁴³

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang

⁴² Sulaiman, B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.72.

⁴³ Asjmuni Abdurrahman, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), h. 53.

Lembaga Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”.⁴⁴ Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di sebidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.⁴⁵

Dan secara umum diketahui, setiap lembaga pengelolaan zakat sudah jelas ketentuannya bahwa dana yang dikelola bukan milik lembaga tersebut, melainkan milik *mustahik*. Lembaga hanya berhak menggunakan hak operasional 1/8 dari pendapatan.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak, Salah Satu Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 119-120.

⁴⁵ Dzanuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39-40.

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai.

c. Persyaratan Lembaga pengelolaan Zakat

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama, beragama Islam, zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua, Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat (LAZ), jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya, keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban

secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah.

Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.

Keenam, syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amail zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.⁴⁶

d. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At- Taubah ayat 60, ayat ini menjelaskan zakat itu diambil atau dijemput dari orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*), untuk kemudian diberikan kepada yang menerimanya (*mustahik*). Pengelolaan zakat ditangani oleh lembaga pengelolaan zakat,

⁴⁶ Didi Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2002), h. 127.

apalagi mempunyai kekuatan hukum *normatif* dan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah hati para *mustahik* apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
- 3) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam menggunakan harta menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islami.⁴⁷

B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Mila Sartika (2008). Dalam Skripsi yang berjudul *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Solo Peduli Surakarta*, membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif. Bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan

⁴⁷*Ibid*, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 126

pekerjaan serta mengurangi pengangguran dan menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat.⁴⁸ Perbedaan penulis dengan peneliti Mila Sartika pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZIS Baitul Maal Amanah LP3UI terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh *mustahik* pada periode 2019. Sedangkan penulis fokus pada syarat-syarat *mustahik* menerima pendayagunaan zakat usaha produktif bagi peningkatan pendapatan usaha *mustahik* yang tergolong pada fakir miskin saja dan usahanya di bidang perdagangan dengan membandingkan pada dua lembaga zakat.

Kedua, penelitian Muhamaad Yusuf. Dalam Skripsi yang berjudul *Studi Analisis terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, membahas mengenai masalah pendayagunaan zakat produktif yang diberikan kepada PKL yang ada di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah.⁴⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1991

⁴⁸ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2008).

⁴⁹ Muhammad Yusuf, “Studi Analisa Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di LAZISMA Jawa Tengah”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009

tentang pengelolaan zakat sedangkan penulis akan menjelaskan tentang peraturan menteri pasal 33. No 52 tentang pendayagunaan zakat usaha produktif.

Ketiga, penelitian Arif Maslah. Dalam skripsi yang berjudul *Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*, membahas mengenai harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribukan kepada para *mustahik* berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut tidak berdampak baik terhadap perekonomian *mustahiq*, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasa kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahik* mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.⁵⁰ Perbedaan penulis dengan penelitian Arif adalah mengenai pendayagunaan zakat produktifnya, penelitian Arif dengan menggunakan binatang ternak untuk memproduksi masyarakat sedangkan penulis lebih menekankan kepada usaha kemandirian yang dilakukan oleh *mustahik* itu sendiri yaitu di bidang perdagangan.

⁵⁰ Arif Maslah, "*Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*", Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah STAIN Salatiga, Semarang, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011)
- Afifudin, D, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Ali al-Musyaiqih, K, *Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Embun Litera, 2010).
- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011).
- Ash-Shiddiq, TM, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka rizki, 2009).
- Azizi, AQ, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Hafidhuddin, D, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2002).
- Hasan, MA, *Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Hasan, MA, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1).

Mu'is, F, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medika, 2011).

Muflih, M, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Isaha lmuEkonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).

Mufraini, MA, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Murysidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2003).

Narbuko, K, Ahmadi, A, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1997).

Qadir, A, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

Qardhawi, Y, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Untera Antamusa, 1993).

Rafi, M, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Ke Produktif Berdayagunaanprespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Citra Pustaka , 2011).

Said, M, *Terjemaah Al-Quran Al Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, cet. Pertama, 1987).

Syah, MI, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Syaifudin, AM, *Ekonomi Masyarakat dalam Pespektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987).

Taneko, SB, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993).

Usman, N, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002).

Zuhridan, M, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1999).

Sumber Internet

<https://jagokata.com/arti-kata/produktif/>(11 Januari 2020)

<https://typoonline.com/kbbi/pendayagunaan/>(20 Desember 2019)

<http://lp3ui.com/category/divisi-kerja-lp3ui> (4 Mei 2020)

Skripsi

Mila Sartika, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.*” Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2008.

Muhammad Yusuf, “*Studi Analisi Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di LAZISMA Jawa Tengah*”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Arif Maslah, “*Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah STAIN Salatiga, Semarang, 2012.

Sumber Jurnal

Arif Wibowo, “*Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Acceleration Kesetaraan Kesejahteraan*”, Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 12, Nomor 2, April 2015

Ahmad Syafiq, “*Zakat Ibadal Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*” Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 2, No. 2 Desember 2015

Wawancara

Hasil Wawancara, Pak Diky, *Manager Pendayagunaan*, Tanggal 28 April 2020.

Hasil Wawancara, Pak Fauzan, *General Manager*, Tanggal 26 February 2020.

Hasil Wawancara, Pak Niki, *Penerima Manfaat Program LAZIS*, Bandar Lampung, 25 November 2020

Hasil Wawancara, Ibu Siti Zaenab, *Penerima Manfaat Program LAZIS*, Bandar Lampung, 27 November 2020.

Hasil Wawancara, Pak Awaluddin, *Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif*, Tanggal 28 November 2020

